

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



OLEH:

SUMADI PURWALAKSANA
NPM. 0871010005

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2012

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER

Oleh:

SUMADI PURWALAKSANA
NPM. 0871010005

Telah Mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Sutrisno S.H M.Hum
NIP.19601212198031001

1. (.....)

2. Subani S.H M.Si
NIP. 195105041983031001

2. (.....)

3. Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP.196206251991031001

3. (.....)

4. Wiwin Yulianingsih, S.H, M.Kn
NPT.3750707225

4. (.....)

Mengetahui :

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM
NIP.196206251991031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN
OLEH DOKTER

Oleh:

SUMADI PURWALAKSANA

NPM. 0871010005

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Pada tanggal 11 Mei 2012

Pembimbing Utama:

Tim Penguji :

1.

Subani S.H M.Si

NIP. 195105041983031001

Sutrisno S.H M.Hum

NIP.19601212198031001

2.

Pembimbing Pendamping

Subani S.H M.Si

NIP. 195105041983031001

3.

Fauzul Aliwarman S.H M.Hum

NPT.38202070221

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM

NIP.196206251991031001

Mengetahui :

DEKAN

Hariyo Sulistiyantoro, S.H, MM

NIP.196206251991031001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sumadi Purwalaksana
Tempat/ tanggal lahir : Makassar 14 januari 1989
Npm : 0871010005
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Rungkut Asri Tengah VII No 2 Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER” dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar asli karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini yang saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui
Pembimbing utama

Surabaya 3 Mei 2012
Penulis

Subani S.H M.Si
Nip:195105041983031001

Sumadi purwalaksana
Npm: 0871010005

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran ALLAH SWT atas berkat dan rahmat-Nya melimpahkan kekuatan lahir dan kemampuan berfikir. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejaknya.

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Mal Praktek Yang Dilakukan Oleh Dokter” ini juga tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran penulisan skripsi ini. Keberhasilan penulisan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro S.H MM selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno S.H M.Hum selaku Wedek I Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Bapak Drs. EC Gendut Sukarno MS selaku Wadek II Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani S.H M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Dan selaku pembimbing I skripsi yang selalu banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Fauzul Aliwarman S.H M.Hum selaku dosen pembimbing II skripsi yang selalu banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
8. Orang tua yang telah memberikan dukungan moral, doa dan pengorbanan yang begitu besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan .
9. Adik dan saudara yang selalu mendoakan untuk keberhasilanku.
10. Asri Kumala yang selalu memberikan spirit, kasih sayang serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum yang banyak memberikan motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun juga sangat diharapkan demi kesempurnaannya, dan penulis juga berharap agar skripsi ini dapat memberikan sedikit pengetahuan dalam perkembangan hukum di negara Indonesia.

Surabaya, Mei 2012

Penulis

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama : Sumadi Purwalaksana
Npm : 0871010005
Tempat Tanggal Lahir : Makassar, 14 Januari 1989
Program Study : Pidana
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG
DILAKUKAN OLEH DOKTER

ABSTRAKSI

Penelitian Ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter dan pertanggung jawaban hukum bagi dokter yang melakukan mal praktek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sumber data diperoleh dari literatur, Undang-undang dan wawancara terhadap korban dan pakar hukum pidana, analisa data yang digunakan menggunakan data deskriptif analisis yaitu mengkaji fakta social yang timbul di masyarakat, hasil penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi korban mal praktek merupakan tanggung jawab penuh bagi pelaku mal praktek dalam hal ini adalah dokter. Bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada korban mal praktek berupa ganti kerugian, baik ganti kerugian berupa materiil maupun immateriil. Sedangkan seorang dokter dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam tiga macam kategori yaitu, mal praktek yang disebabkan atas kesalahan, mal praktek yang disebabkan atas kelalaian, dan mal praktek yang disebabkan atas kesengajaan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Bagi Korban Mal Praktek, Mal Praktek, Dokter

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.	v
DAFTAR ISI.	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	3
1.5 Kajian Pustaka.....	4
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN MAL PRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER.	34
2.1 Konsep Perlindungan Hukum.....	34
2.2 Bentuk Perlindungan Hukum korban Mal Praktek.....	38
2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Mal Praktek.....	44
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI DOKTER YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MAL PRAKTEK.....	50
3.1 Pertanggung Jawaban Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan Dibidang Hukum Pidana.....	50

3.2	Pertanggung Jawaban Dokter Sebagai Pelaku Mal Praktek.....	52
3.3	Tanggung Jawab Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Mal Praktek Disebabkan Atas Kesalahan.....	52
3.4	Tanggung Jawab Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Mal Praktek Disebabkan Atas Kelalaian.....	54
3.5	Tanggung Jawab Hukum Bagi Dokter Yang Melakukan Mal Praktek Disebabkan Atas Kesengajaan.....	56
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....		58
4.1	Kesimpulan.....	58
4.2	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan selalu memberikan dampak yang baik bahkan yang buruk sekalipun. Tergantung bagaimana setiap individu itu memanfaatkan ilmu pengetahuan itu. Manfaat yang dimaksud disini apakah setiap tindakan itu bermanfaat bagi yang membutuhkan atau malah menambah masalah bagi yang membutuhkan. Hal ini tidak terlepas pula dalam ilmu kedokteran ditinjau dari beragamnya penyakit manusia sehingga tidak menuntut kemungkinan bahwa yang terjadi itu tidak sesuai dengan harapan. Munculnya beragam penyakit manusia memaksakan dokter untuk melakukan penelitian yang baru yang diharapkan dapat memberikan solusi bagi yang membutuhkan atau dalam hal ini adalah pasien.

Penelitian pula terkadang membuat dampak buruk yang sangat merugikan pihak lain atau khususnya pasien. Penelitian yang dilakukan yang berdampak buruk itulah yang disebut mal praktek. Mal praktek di kehidupan masyarakat sangat membawa dampak yang buruk misalnya rasa was-was setiap pasien yang akan melakukan pengobatan karena mereka merasa takut akan menjadi korban berikut dari mal praktek.

Ketakutan mereka sangat beralasan karena korban dari mal praktek tersebut buruk misalnya saja setiap korban mal praktek akan cacat permanen

bahkan nyawa pun bisa menjadi bahan taruhannya. Saat ini telah banyak masyarakat yang menjadi korban dalam mal praktek hanya saja mereka tidak mengetahui bahwa mereka telah menjadi korban dari mal praktek itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengetahui ilmu kedokteran serta rasa takut untuk melakukan bantuan hukum dikarenakan minimnya tingkat perekonomian dan kelayakan korban dalam menjalankan kehidupan. Keadaan tersebut yang terkadang membuat mereka lebih cenderung pasrah ketika mereka mengetahui bahwa mereka merupakan salah satu korban dari mal praktek.

Pada sisi lain misalnya saja dari yang bersangkutan dalam hal ini adalah dokter, mereka tidak begitu memahami apa arti dari pelayanan dan bahkan tidak menuntut kemungkinan bahwa mereka akan melanggar kode etik, yang merupakan pegangan mereka dalam menjalankan profesinya, dan merupakan pengetahuan dalam menyesuaikan perkembangan ilmu kedokteran yang semakin lama semakin maju. Hal tersebut pula dikarenakan telah muncul bermacam-macam jenis penyakit yang memaksa dokter untuk memberikan jalan keluar yang sebisanya dapat membuat pasien untuk bisa sembuh atau tertolong nyawanya. Inilah yang terkadang membuat setiap pelaku mal praktek mencoba untuk menemukan jalan keluarnya. Padahal dalam menjalani hal tersebut sangat menimbulkan kesalahan walaupun terkadang jika hasil percobaan itu sukses maka pasien bisa tertolong, dalam hal ini kita tidak membahas mengenai tolak ukur dari kesuksesan itu, tetap

memikirkan bagaimana dampak terburuk yang dapat berakibat cacat atau lebih buruknya lagi kematian.

Sehingga pengangkatan judul tersebut diharapkan dapat memberikan arahan atau pengetahuan serta upaya apa saja yang harus dilakukan ketika kita menjadi korban dari mal praktek tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter?
2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi dokter yang menyebabkan terjadinya mal praktek?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum apa yang akan diberikan kepada korban mal praktek yang dilakukan oleh dokter.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi dokter yang menyebabkan terjadinya mal praktek

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan gambaran dan sumbangan dalam berpikir kepada masyarakat untuk menjauhkan diri dari korban mal praktek.

2. Untuk memberikan pengetahuan kepada korban mal praktek mengenai perlindungan hukum bagi mereka ketika telah menjadi korban dari mal praktek.
3. Sebagai dasar dalam upaya pencegahan terjadinya mal praktek yang dilakukan oleh dokter

1.5 Kajian Pustaka

A. Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan menurut H.J.J.Leenen adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana.¹

Arti ketentuan hukum di sini tidak hanya mencakup pedoman internasional, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, namun ilmu pengetahuan dan kepustakaan dapat juga merupakan sumber hukum. Hukum medis yang mempelajari hubungan yuridis dimana dokter menjadi salah satu pihak, adalah bagian dari hukum kesehatan. Dari perumusan tersebut di atas, sebenarnya bahwa hukum kesehatan adalah lebih luas dari pada hukum medis, jika dilihat hukum kesehatan, maka ia meliputi:

- Hukum medis (Medical law)
- Hukum keperawatan (Nurse law)
- Hukum rumah sakit (Hospital law)
- Hukum pencemaran lingkungan (Environmental law),
- Hukum limbah .(dari industri, rumah tangga, dsb)
- Hukum polusi (bising, asap, debu, bau, gas yang mengandung racun)

¹Rismalinda, Eetika Profesi dan Hukum Kesehatan, trans info media, Jakarta, 2011, h.63

- Hukum peralatan yang memakai X-ray (Cobalt, nuclear)
- Hukum keselamatan kerja,
- Hukum dan peraturan peraturan lainnya yang ada kaitan langsung dengan kesehatan

Peter Ippel, menjelaskan bahwa hukum kesehatan tidak terdapat dalam satu bentuk peraturan khusus, tetapi letaknya tercecer dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan. Dapat diketemukan di dalam Pasal-pasal khusus yang ada kaitanya dengan bidang kesehatan. Hukum kesehatan merupakan suatu conglomerat dari peraturan-peraturan dari sumber yang berlainan.²

Ada yang terletak dibidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum administrasi yang penerapan, penafsiran serta penilaian terhadap faktanya di bidang medis. Di sinilah letak kesukaran hukum kesehatan, karena menyangkut dua siplin yang berlainan sekaligus. Bagi profesi hukum yang mau memperdalam di bidang Hukum Medis masih harus ditambah dengan pengertian dan sedikit-dikitnya harus mengetahui tata-cara ilmu pengetahuan di bidang medis yang sangat kompleks dan bersifat kasuistik. Pengalaman secara nyata menyaksikan di rumah sakit untuk waktu tertentu ada baiknya, sehingga bisa memperoleh gambaran yang lebih jelas secara menyeluruh, ada suatu bidang lain yang berkaitan erat dengan Hukum Medis, yaitu apa yang dinamakan “Kedokteran Kehakiman”, harus dibedakan antara Kedokteran Kehakiman yang termasuk disiplin

² Peter Ippel (1986) dalam Sri Sumiarti, Tinjauan Hukum Kesehatan [http:// repository.usu.ac.id /bitstream/ 123456789/24762/4/ Chapter% 20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24762/4/Chapter%20II.pdf), diakses pada hari minggu tgl 18 desember 2011, 10.00 wib

Medis dan Hukum Medis (Medical law) termasuk disiplin hukum, namun akhir-akhir ini di negara Anglo Saxon mulai timbul penafsiran baru, sehingga mulai timbul kekaburan batas antara Hukum Medis dan Kedokteran Kehakiman. Hal ini karena ada sementara pendapat yang menyatukan dan mencakup kedua bidang ini menjadi satu di dalam suatu wadah yang dinamakan hukum kesehatan.

2. Unsur-Unsur Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan dibagi menjadi empat objek yang merupakan unsur dalam hukum kesehatan itu sendiri. Adapun unsur hukum kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Rumah Sakit

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang parmanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Adanya kemajuan teknologi disertai dengan penggunaan cara-cara baru dibidang diagnostik dan terapeutik mengharuskan rumah sakit mempekerjakan berbagai profesi kedokteran dan profesi lain sehingga rumah sakit menjadi organisasi padat karya spesialis dan merupakan tempat dimana terjadi proses pengubahan dari masukan menjadi luaran. Masukan

utama adalah dokter, perawat personil lainnya, prasarana, sarana peralatan dan sebagainya merupakan bagian dari rumah sakit.³

b. Dokter

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.⁴

³ Asta Qauliyah, Pengertian Rumah Sakit, <http://astaqauliyah.com/2008/01/pengertian-dan-fungsi-rumah-sakit/> diakses pada hari rabu tgl 4 januari 2012, 23.00 wib

⁴ Ida Rusma Herawati, Pengertian Dokter, http://bpiuinsuskariau3.blogspot.com/2010/12/pengertian-dokter_553.html, diakses pada hari rabu tgl 4 januari 2012, 23.00 wib

c. Pasien

Pasien adalah seseorang yang menerima perawatan medis, Sering kali pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya⁵

d. Perawat

Pegertian perawat dapat kita lihat dalam keputusan menteri kesehatan No 1239/MENKES/SK/X/2001 tentang Registrasi dan Praktik Perawat, maka pada pasal 1 ayat 1 berbunyi perawat adalah seorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam atau di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

B. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Mal Praktek

Mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, di antaranya sebagai berikut:

1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

⁵Wikipedia, Pengertian Pasien, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses pada hari rabu tgl 4 januari 2012, 23.00 wib

⁶ Wikipedia, Pengertian Perawat, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pasien>, diakses pada hari rabu tgl 4 januari 2012, 23.00 wib

2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian;

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya. Konsep perlindungan terhadap korban secara teoritis dapat dilakukan berbagai cara baik melalui langkah-langkah yuridis yang diiringi juga dengan langkah non-yuridis dalam bentuk tindakan-tindakan pencegahan. Konsep perlindungan terhadap korban kejahatan diberikan tergantung pada jenis penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara material (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan. Konsep perlindungan korban melalui langkah-langkah yuridis salah satunya melalui kebijakan hukum pidana baik dari segi hukum materiil maupun dari segi hukum formil. Bertolak dari uraian di atas, maka kerugian/penderitaan yang dialami korban dapat dibedakan antara yang bersifat fisik/materiil (dapat diperhitungkan- dengan uang) dan yang sifatnya immaterial (misalnya berupa perasaan takut, sedih, sakit, kejutan psikis, dan lain-lain)⁷

⁷Sri Sumiarti, Perlindungan Hukum, http://eprints.undip.ac.id/18323/1/Sri_Sumiati.pdf diakses pada hari minggu tgl 18 desember 2011, 08.00 wib

C. Tinjauan tentang Mal Praktek

1. Pengertian Mal Praktek

Secara harfiah “mal” mempunyai arti “salah” sedangkan “praktek” mempunyai arti “pelaksanaan” atau “tindakan”, sehingga mal praktek berarti “pelaksanaan atau tindakan yang salah”.

Definisi mal praktek profesi kesehatan adalah kelalaian dari seseorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien, yang lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.⁸

2. Upaya Pencegahan Mal Praktek dalam Pelayanan Kesehatan

Upaya pencegahan mal praktek dalam pelayanan kesehatan disertai adanya kecenderungan masyarakat untuk menggugat dokter karena adanya mal praktek, diharapkan para dokter dalam menjalankan tugasnya selalu bertindak profesionalisme, yakni:

- a. Tidak menjanjikan atau memberi garansi akan keberhasilan upayanya, karena perjanjian berbentuk daya upaya (inspaning verbintenis) bukan perjanjian akan berhasil (resultaat verbintenis).
- b. Sebelum melakukan intervensi agar selalu dilakukan informed consent.
- c. Mencatat semua tindakan yang dilakukan dalam rekam medis.
- d. Apabila terjadi keragu-raguan, konsultasikan kepada senior atau dokter.
- e. Memperlakukan pasien secara manusiawi dengan memperhatikan segala kebutuhannya.
- f. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan pasien, keluarga dan masyarakat sekitarnya⁹

⁸Rismalinda, op.cit, h 73

⁹ Ibid, h 87

3. Mal Praktek di bidang Hukum

Untuk mal praktek hukum atau juridical mal praktek dibagi dalam 3 kategori sesuai bidang hukum yang dilanggar, yakni Criminal mal praktek, Civil mal praktek dan Administrative mal praktek.¹⁰

a. Criminal mal praktek

Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori criminal malpractice manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni :

- 1.) Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela.
- 2.) Dilakukan dengan sikap batin yang salah (mens rea) yang berupa kesengajaan (intensional), kecerobohan (recklessness) atau kealpaan (negligence).
 - a.) Criminal mal praktek yang bersifat sengaja (intensional) misalnya melakukan euthanasia (Pasal 344 KUHP), membuka rahasia jabatan (Pasal 332 KUHP), membuat surat keterangan palsu (Pasal 263 KUHP), melakukan aborsi tanpa indikasi medis Pasal 299,341 KUHP).
 - b.) Criminal mal praktek yang bersifat ceroboh (recklessness) misalnya melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien informed consent.
 - c.) Criminal mal praktek yang bersifat negligence (lalai) misalnya kurang hati-hati mengakibatkan luka, cacat atau meninggalnya pasien, ketinggalan klem dalam perut pasien saat melakukan operasi. Pertanggung jawaban di depan hukum pada criminal mal praktek adalah bersifat individual/personal. Oleh sebab itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain atau kepada rumah sakit/sarana kesehatan.

¹⁰ Ibid, h 75

b. Civil mal praktek

Seorang tenaga kesehatan akan disebut melakukan civil mal praktek apabila tidak melaksanakan kewajiban atau tidak memberikan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati (ingkar janji). Tindakan tenaga kesehatan yang dapat dikategorikan civil malpraktek antara lain:

- 1.) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan.
- 2.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melakukannya.
- 3.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna.
- 4.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Pertanggung jawaban civil mal praktek dapat bersifat individual atau korporasi dalam prinsip ini maka rumah sakit/sarana kesehatan dapat bertanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan karyawannya (tenaga kesehatan) selama tenaga kesehatan tersebut dalam rangka melaksanakan tugas kewajibannya

c. Administrative mal praktek

Dokter dikatakan telah melakukan administrative mal praktek manakala tenaga perawatan tersebut telah melanggar hukum administrasi. Perlu diketahui bahwa dalam melakukan police power, pemerintah mempunyai kewenangan menerbitkan berbagai ketentuan di bidang kesehatan, misalnya tentang persyaratan bagi tenaga perawatan untuk menjalankan profesinya (Surat Ijin Kerja, Surat Ijin Praktek), batas kewenangan serta kewajiban tenaga perawatan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka tenaga kesehatan yang bersangkutan dapat dipersalahkan karena telah melanggar hukum administrasi.

4. Mal Praktek ditinjau dari Segi Etika dan Hukum

Masalah dugaan mal praktek medik, sering diberitakan di media masa. Namun, sampai kini belum ada yang tuntas penyelesaiannya. Tadinya masyarakat berharap bahwa UU Praktik

Kedokteran itu akan juga mengatur masalah malpraktek medik. Namun, materinya ternyata hanya mengatur masalah disiplin yang bersifat interen. Walaupun setiap orang dapat mengajukan ke Majelis Disiplin Kedokteran, namun hanya menyangkut segi disiplin saja. Untuk segi hukumnya, undang-undang merujuk ke KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bila terjadi tindak pidana. Namun, kalau sampai diajukan ke Pengadilan tetap terkatung-katung tidak ada kunjung penyelesaiannya,¹¹

Dugaan mal praktek medik dalam negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, sudah diatur dalam ketentuan hukum dalam common law dan menjadi yurisprudensi. Walaupun Indonesia berdasarkan hukum tertulis, seharusnya tetap terbuka putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menjadi yurisprudensi.

Dan karena masyarakat semakin sadar terhadap masalah pelayanan kesehatan, DPR yang baru harus dapat menangkap kondisi tersebut dengan berinisiatif membentuk Undang-Undang (UU) tentang Mal praktek Medik, sebagai pelengkap UU Praktik Kedokteran.

Bagaimana materinya, kita bisa belajar dari negara-negara yang telah memiliki peraturan tentang hal tersebut. Harapan masyarakat, ketika mereka merasa dirugikan akibat tindakan medis, landasan hukumnya jelas. Sedangkan di pihak para medis, setiap tindakannya tidak perlu lagi dipolemikan sepanjang sesuai undang-

¹¹ Uuz, Makalah Malpraktek, <http://chans-ums.blogspot.com//2009/07/malpraktek.html>, diakses pada hari kamis tanggal 1 Desember 2011, 16.00 wib

undang. Etika punya arti yang berbeda-beda jika dilihat dari sudut pandang pengguna yang berbeda dari istilah itu. Bagi ahli falsafah, etika adalah ilmu atau kajian formal tentang moralitas. Moralitas adalah ha-hal yang menyangkut moral, dan moral adalah sistem tentang motivasi, perilaku dan perbuatan manusia yang dianggap baik atau buruk. Franz Magnis Suseno menyebut etika sebagai ilmu yang mencari orientasi bagi usaha manusia untuk menjawab pertanyaan yang amat fundamental: bagaimana saya harus hidup dan bertindak? Peter Singer, filusf kontemporer dari Australia menilai kata etika dan moralitas sama artinya, karena itu dalam buku-bukunya ia menggunakan keduanya secara tertukar-tukar.

Bagi sosiolog, etika adalah adat, kebiasaan dan perilaku orang-orang dari lingkungan budaya tertentu. Bagi praktisi profesional termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya etika berarti kewajiban dan tanggung jawab memenuhi harapan profesi dan masyarakat, serta bertindak dengan cara-cara yang profesional, etika adalah salah satu kaidah yang menjaga terjalinnya interaksi antara pemberi dan penerima jasa profesi secara wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat.

Bagi eksekutif puncak rumah sakit, etika seharusnya berarti kewajiban dan tanggung jawab khusus terhadap pasien dan klien lain,

terhadap organisasi dan staf, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah dan pada tingkat akhir walaupun tidak langsung terhadap masyarakat. Kriteria wajar, jujur, adil, profesional dan terhormat tentu berlaku juga untuk eksekutif lain di rumah sakit.

Bagi asosiasi profesi, etika adalah kesepakatan bersama dan pedoman untuk diterapkan dan dipatuhi semua anggota asosiasi tentang apa yang dinilai baik dan buruk dalam pelaksanaan dan pelayanan profesi itu.

Mal praktek meliputi pelanggaran kontrak (breach of contract), perbuatan yang disengaja (intentional tort), dan kelalaian (negligence). Kelalaian lebih mengarah pada ketidak sengaja (culpa). Kelalaian bukanlah suatu pelanggaran hukum atau kejahatan, selama tidak sampai membawa kerugian atau cedera kepada orang lain dan orang itu dapat menerimanya. Ini berdasarkan prinsip hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele. Ketidak tercantuman istilah dan definisi menyeluruh tentang malpraktek dalam hukum positif di Indonesia, kelalaian medik dan mal praktek yang berlarut-larut, hingga referensi-referensi tentang mal praktek yang masih dominan diadopsi dari luar negeri yang relevansinya dengan kondisi di Indonesia masih dipertanyakan, semuanya merupakan Pe-Er besar bagi pemerintah.

5. Jenis-Jenis Mal Praktek

a. Mal Praktek Etik

Yang dimaksud dengan malpraktek etik adalah dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Sedangkan etika kedokteran yang dituangkan da dalam KODEKI merupakan seperangkat standar etis, prinsip, aturan atau norma yang berlaku untuk dokter.

Mal praktek etik ini merupakan dampak negatif dari kemajuan teknologi kedokteran. Kemajuan teknologi kedokteran yang sebenarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pasien, dan membantu dokter untuk mempermudah menentukan diagnosa dengan lebih cepat, lebbih tepat dan lebih akurat sehingga rehabilitasi pasien bisa lebih cepat, ternyata memberikan efek samping yang tidak diinginkan.

b. Mal Praktek Yuridik

Didalam Mal praktek Yuridik tersebut dibedakan atas dua macam yaitu :

1.) Mal Praktek Perdata (Civil Malpraktek)

Terjadi apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (wanprestasi) didalam transaksi terapeutik oleh dokter atau tenaga kesehatan lain, atau terjadinya perbuatan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian pada pasien. Adapun isi dari tidak dipenuhinya perjanjian tersebut dapat berupa:

- a.) Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatan wajib dilakukan.
- b.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat melaksanakannya.
- c.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna dalam pelaksanaan dan hasilnya.
- d.) Melakukan apa yang menurut kesepakatannya tidak seharusnya dilakukan.

Sedangkan untuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum haruslah memenuhi beberapa syarat seperti :

- a.) Harus ada perbuatan (baik berbuat maupun tidak berbuat)

- b.) Perbuatan tersebut melanggar hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis)
- c.) Ada kerugian
- d.) Ada hubungan sebab akibat (hukum kausal) antara perbuatan yang melanggar hukum dengan kerugian yang diderita.
- e.) Adanya kesalahan

Sedangkan untuk dapat menuntut penggantian kerugian (ganti rugi) karena kelalaian dokter, maka pasien harus dapat membuktikan adanya empat unsur berikut :

- a.) Adanya suatu kewajiban dokter terhadap pasien.
- b.) Dokter telah melanggar standar pelayanan medik yang lazim.
- c.) Penggugat (pasien) telah menderita kerugian yang dapat dimintakan ganti ruginya.
- d.) Secara faktual kerugian itu disebabkan oleh tindakan dibawah standar.

Namun adakalanya seorang pasien tidak perlu membuktikan adanya kelalaian dokter. Dalam hukum ada kaidah yang berbunyi “res ipsa loquitur” yang artinya fakta telah

berbicara. Misalnya karena kelalaian dokter terdapat kain kasa yang tertinggal dalam perut sang pasien tersebut akibat tertinggalnya kain kasa tersebut timbul komplikasi paksa bedah sehingga pasien harus dilakukan operasi kembali. Dalam hal demikian, dokterlah yang harus membuktikan tidak adanya kelalaian pada dirinya.

2.) Mal Praktek Pidana (Criminal Mal praktek)

Terjadi apabila pasien meninggal dunia atau mengalami cacat akibat dokter atau tenaga kesehatan lainnya kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya penyembuhan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut.

e.) Mal praktek pidana karena kesengajaan

Misalnya pada kasus-kasus melakukan aborsi tanpa indikasi medis, euthanasia, membocorkan rahasia kedokteran, tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan dokter yang tidak benar.

f.) Mal praktek pidana karena kecerobohan

Misalnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar profesi serta melakukan tindakan tanpa disertai persetujuan tindakan medis.

g.) Malpraktek pidana karena kealpaan

Misalnya terjadi cacat atau kematian pada pasien sebagai akibat tindakan dokter yang kurang hati-hati atau alpa dengan tertinggalnya alat operasi yang didalam rongga tubuh pasien.

3.) Mal Praktek Administratif (Administrative Malpraktek)

Terjadi apabila dokter atau tenaga medis kesehatan lain melakukan pelanggaran terhadap Hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter tanpa lisensi atau izinnya, menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik.¹²

6. Pembuktian Mal Praktek di Bidang Pelayanan Kesehatan

Dalam kasus atau gugatan adanya civil mal praktek pembuktiannya dapat dilakukan dengan dua cara yakni:

a. Cara langsung

Oleh Taylor membuktikan adanya kelalaian memakai tolok ukur adanya 4 D yakni:

¹²Law Community, Mal Praktek dan Pertanggung Jawaban Hukumnya, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23439/4/Chapter%20I.pdf>, diakses pada hari kamis tanggal 1desember 2011, 17.00 wiib

1.) Duty (kewajiban)

Dalam hubungan perjanjian tenaga dokter dengan pasien, dokter haruslah bertindak berdasarkan:

- a.) Adanya indikasi medis
- b.) Bertindak secara hati-hati dan teliti
- c.) Bekerja sesuai standar profesi
- d.) Sudah ada informed consent.

2.) Dereliction of Duty (penyimpangan dari kewajiban)

Jika seorang dokter melakukan tindakan menyimpang dari apa yang seharusnya atau tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan menurut standard profesinya, maka dokter dapat dipersalahkan.

3.) Direct Cause (penyebab langsung)¹³

4.) Damage (kerugian)

Dokter untuk dapat dipersalahkan haruslah ada hubungan kausal (langsung) antara penyebab (causal) dan kerugian (damage) yang diderita oleh karenanya dan tidak ada peristiwa atau tindakan sela diantaranya., dan hal ini haruslah dibuktikan dengan jelas. Hasil (outcome) negatif tidak dapat sebagai dasar menyalahkan dokter. Sebagai adagium dalam ilmu pengetahuan hukum, maka pembuktiannya adanya kesalahan dibebankan atau diberikan oleh si penggugat.¹⁴

b. Cara tidak langsung

Cara tidak langsung merupakan cara pembuktian yang mudah bagi pasien, yakni dengan mengajukan fakta-fakta yang diderita olehnya sebagai hasil layanan perawatan, hal ini dapat diterapkan apabila fakta-fakta yang ada memenuhi kriteria:

¹³Rismalinda, op.cit, h.80

¹⁴ Hendrojono Soewono, Perlindungan Hak-hak Pasien dalam transaksi Terapeutik, Srikandi, Surabaya, h.104

- 1.) Fakta tidak mungkin ada/terjadi apabila dokter tidak lalai
- 2.) Fakta itu terjadi memang berada dalam tanggung jawab dokter
- 3.) Fakta itu terjadi tanpa ada kontribusi dari pasien.¹⁵

7. Perbuatan Melawan Hukum dalam Mal Praktek Kedokteran

Apabila dalam perlakuan medis terdapat kesalahan dengan menimbulkan akibat kerugian maka pasien berhak menuntut adanya penggantian kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 BW)¹⁶

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum seperti dirumuskan Pasal 1365 BW maka ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk kerugian adanya perbuatan melawan hukum. Tentu saja termasuk malpraktik kedokteran yang masuk kualifikasi perbuatan melawan hukum, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan (daad) yang termasuk kualifikasi perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kesalahan (doleus maupun coelpos) si pembuat.
- c. Adanya akibat kerugian (schade)¹⁷

¹⁵ Rismalinda, op.cit, h 80

¹⁶ Adam Chazawi, Malpraktik Dokter, Bayu Media, Malang, h.53

¹⁷ Ibid. h.61

8. Asumsi masyarakat terhadap Mal Praktek

Maraknya malpraktek di Indonesia membuat masyarakat tidak percaya lagi pada pelayanan kesehatan di Indonesia. Ironisnya lagi, pihak kesehatan pun khawatir kalau para tenaga medis Indonesia tidak berani lagi melakukan tindakan medis karena takut berhadapan dengan hukum. Lagi-lagi hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi yang baik antara tenaga medis dan pasien. Tidak jarang seorang tenaga medis tidak memberitahukan sebab dan akibat suatu tindakan medis. Pasien pun enggan berkomunikasi dengan tenaga medis mengenai penyakitnya. Oleh karena itu, Departemen Kesehatan perlu mengadakan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana kinerja seorang tenaga medis.

Sekarang ini tuntutan professional terhadap profesi ini makin tinggi. Berita yang menyudutkan serta tudingan bahwa dokter telah melakukan kesalahan dibidang medis bermunculan. Di Negara-negara maju yang lebih dulu mengenal istilah makpraktek medis ini ternyata tuntutan terhadap tenaga medis yang melakukan ketidaklayakan dalam praktek juga tidak surut. Biasanya yang menjadi sasaran terbesar adalah dokter spesialis bedah (ortopedi, plastic dan syaraf), spesialis anestesi serta spesialis kebidanan dan penyakit kandungan.

Tuntutan yang demikian dari masyarakat dapat dipahami mengingat sangat sedikit jumlah kasus malpraktek medik yang diselesaikan di pengadilan. Apakah secara hukum perdata, hukum pidana atau dengan hukum administrasi. Padahal media massa nasional juga daerah berkali-kali melaporkan adanya dugaan malpraktek medik yang dilakukan dokter tapi sering tidak berujung pada penyelesaian melalui sistem peradilan. Salah satu dampak adanya malpraktek pada zaman sekarang ini (globalisasi) Saat ini kita hidup di jaman globalisasi, jaman yang penuh tantangan, jaman yang penuh persaingan dimana terbukanya pintu bagi produk-produk asing maupun tenaga kerja asing ke Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan dunia medis, ada manfaat yang didapat, tetapi banyak pula kerugian yang ditimbulkan. Manfaatnya adalah seiring masuknya jaman globalisasi, maka tidak menutup kemungkinan akan kehadiran peralatan pelayanan kesehatan yang canggih.

Hal ini memberikan peluang keberhasilan yang lebih besar dalam kesembuhan pasien. Akan tetapi, banyak juga kerugian yang ditimbulkan. Masuknya peralatan canggih tersebut memerlukan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikannya serta memperbaikinya kalau rusak. dengan masuknya peralatan-peralatan canggih tersebut, maka mutu pelayanan kesehatan harus ditingkatkan,

yang terjadi saat ini adalah banyak tenaga medis yang melakukan kesalahan dalam pengoperasian peralatan canggih tersebut sehingga menimbulkan malpraktek. Jelas sekali bahwa ketergantungan pada peralatan pelayanan kesehatan ini dapat menghambat pelayanan kesehatan. Untuk menindak lanjuti masalah ini, agar tidak sampai terjadi malpraktek, perlu adanya penyuluhan kepada tenaga pelayanan kesehatan mengenai masalah ini. Satu hal yang lebih penting lagi adalah perlu adanya kesadaran bagi para tenaga medis untuk terus belajar dan belajar agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan peralatan canggih ini demi mencegah terjadinya mal praktek. Selain pembahasan dari sisi peralatan tadi, juga perlu dipikirkan masalah eksistensi dokter Indonesia dalam menghadapi globalisasi.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, di jaman globalisasi ini memberikan pintu terbuka bagi tenaga kesehatan asing untuk masuk ke Indonesia, begitu pula tenaga kesehatan Indonesia dapat bekerja diluar negeri dengan mudah. Namun, apabila tidak ada tindakan untuk mempersiapkan hal ini, dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kesehatan kita. Bayangkan saja, tidak menutup kemungkinan apabila seorang tenaga medis yang kurang mempersiapkan dirinya untuk berkiprah di negeri orang, dikarenakan ilmunya yang masih

minim serta perbedaan kurikulum di negeri yang ia tempati, terjadilah malpraktek.

Hal ini tidak saja mencoreng nama baik tenaga medis tersebut tetapi juga nama baik dunia kesehatan Indonesia. Yang jelas, masyarakat sangat berharap akan peran dari Pemerintah pada umumnya dan peran dari Departemen Kesehatan pada khususnya untuk mempersiapkan tenaga kesehatan Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman.

D. Tinjauan Tentang Pertanggung Jawaban Pidana

Seorang dokter yang tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar operasional kedokteran dan standar prosedur tindakan medik berarti telah melakukan kesalahan atau kelalaian, yang selain dapat dituntut secara hukum pidana, juga dapat digugat ganti rugi secara perdata dalam hal pasien menderita kerugian.

Penuntutan pertanggung jawaban pidana hanya dapat dilakukan jika pasien menderita cacat permanen atau meninggal dunia, sedangkan gugatan secara perdata dapat dilakukan asal pasien menderita kerugian meskipun terjadi kesalahan kecil¹⁸

¹⁸ Endang Kusuma Astuti, Tanggungjawab Hukum Dokter dalam Upaya Pelayanan Medis Kepada Pasien, http://eprints.undip.ac.id/18323/1/Sri_Sumiati.pdf diakses pada hari minggu tgl 18 desember 2011, 08.00 wib

Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana bagi seorang dokter yang melakukan perbuatan mal praktek medis, diperlukan pembuktian adanya unsur-unsur kesalahan, yang dalam hukum pidana dapat berbentuk kesengajaan dan kelalaian. Perbuatan mal praktek medis yang dilakukan dengan kesengajaan, tidaklah rumit untuk membuktikannya.¹⁹

Definisi kelalaian medis menurut Leenen sebagai kegagalan dokter untuk bekerja menurut norma “medische profesionele standard” yaitu bertindak dengan teliti dan hati-hati menurut ukuran standar medis dari seorang dokter dengan kepandaian rata-rata dari golongan yang sama dengan menggunakan cara yang selaras dalam perbandingan dengan tujuan pengobatan tersebut sehingga seorang dokter dapat disalahkan dengan kelalaian medis apabila dokter menunjukkan kebodohan serius, tingkat kehati-hatian yang sangat rendah dan kasar sehingga sampai menimbulkan cedera atau kematian pada pasien. Hal ini oleh karena seorang dokter disyaratkan mempunyai tingkat kehati-hatian yang harus lebih tinggi dari orang awam.

Dokter sebagai tenaga profesional adalah bertanggung jawab dalam setiap tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, didasarkan pada niat baik yaitu berupaya dengan sungguh-sungguh berdasarkan pengetahuannya yang dilandasi dengan sumpah dokter, kode etik kedokteran dan standar profesinya untuk menyembuhkan/menolong pasien. Antara lain adalah:

¹⁹Ibid.

a. Tanggung Jawab Etis

Peraturan yang mengatur tanggung jawab etis dari seorang dokter adalah Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No 434/Men Kes/SK/X/1983. Kode Etik Kedokteran Indonesia disusun dengan mempertimbangkan international Code of Medical Ethics dengan landasan idiil Pancasila dan landasan Struktural UUD 1945. Kode Etik Kedokteran Indonesia ini mengatur hubungan antar manusia yang mencakup kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya dan kewajiban dokter terhadap diri sendiri.

b. Tanggung Jawab Profesi

Tanggung jawab profesi dokter berkaitan erat dengan profesionalisme seorang dokter. Hal ini terkait dengan:

1.) Pendidikan, pengalaman dan kualifikasi lain

Dalam menjalankan tugas profesinya seorang dokter harus mempunyai derajat pendidikan yang sesuai dengan bidang keahlian yang ditekuninya. Dengan dasar ilmu yang diperoleh semasa pendidikan yang ditekuninya di fakultas kedokteran maupun spesialisasi dan pengalamannya untuk menolong penderita.

2.) Derajat risiko perawatan

Derajat risiko perawatan diusahakan untuk sekecil-kecilnya, sehingga efek samping dari pengobatan diusahakan minimal mungkin. Disamping itu mengenai derajat risiko perawatan harus diberitahukan terhadap penderita maupun keluarganya, sehingga pasien dapat memilih alternatif dari perawatan yang diberitahukan oleh dokter.

3.) Peralatan perawatan

Perlunya dipergunakan pemeriksaan dengan menggunakan peralatan perawatan, apabila dari hasil pemeriksaan luar kurang didapatkan hasil yang akurat sehingga diperlukan pemeriksaan menggunakan bantuan alat.

c. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum dokter adalah suatu “keterikatan” dokter terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan profesinya. Tanggung jawab seorang dokter dalam bidang hukum terbagi 3 (tiga) bagian, yaitu tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab hukum administrasi serta Tanggung jawab pidana disini timbul bila pertama-tama dapat dibuktikan adanya kesalahan profesional, misalnya kesalahan dalam diagnosis atau kesalahan dalam cara-cara pengobatan atau perawatan. Dari segi hukum, kesalahan/kelalaian akan selalu berkait dengan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab apabila dapat menginsafi makna yang kenyataannya dari perbuatannya, dan menginsafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan niat/kehendaknya dalam melakukan perbuatan tersebut. Sehubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ini, dalam menentukan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak perbuatan yang dilakukan itu merupakan perbuatan

yang dilarang oleh undang-undang dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yaitu berupa dolus (kesenjangan) serta culpa (kelalaian/kelupaan) serta tidak adanya alasan pemaaf. Mengenai kelalaian (neglience) mencakup dua hal yaitu karena melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.²⁰

1.6 Metodologi Penelitian

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi panutan bagi perilaku serta tingkah laku setiap orang.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif, yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran ruang lingkup tentang keadaan hukum di tempat tertentu.

B. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari perundang-undangan yang berlaku atau terdiri dari bahan hukum, baik bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari:

²⁰ Ibid.

- a. Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945
- b. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - 1.) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 - 2.) Undang-Undang Kesehatan
 - 3.) Undang-Undang Kedokteran²¹

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer misalnya saja dari buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, serta media cetak atau elektronik.²²

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya saja kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.²³

C. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah dengan data sekunder yaitu dengan menggunakan study kepustakaan dan wawancara, dengan cara mempelajari berbagai buku sebagai bahan acuan, serta menggunakan Undang-undang No 1 Tahun 1946 (KUHP) dan Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Praktek Kedokteran No 29 Tahun 2004.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asaikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, h 31.

²² Ibid. h.32

²³ Ibid,

Wawancara dilaksanakan di berbagai instansi yaitu: kantor perwakilan IDI di Surabaya, dan masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan dan pakar Hukum Pidana..

D. Teknik Analisis Data

Pengolaan data menggunakan Metode Deskriptif analisis artinya data yang digunakan melalui pendekatan kualitatif terhadap fakta social sebagai kajian hukum empiris. Yang dimaksud di sini adalah dengan menggambarkan suatu gejala yang timbul dalam masyarakat melalui pengamatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi dan makna dari aturan hukum yang dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang telah menjadi objek kajian.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam proposal skripsi tersebut maka dibutuhkan pertanggung jawaban sistematika yang terdiri atas empat bab sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab yang terdiri dari pendahuluan yang memberikan gambaran umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan proposal skripsi ini, yakni: Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian pustaka, Metode penelitian, dan serta sistematika penulisan.

Bab II, sub bab pertama yang berbicara mengenai konsep perlindungan hukum korban mal praktek, sub bab Kedua berbicara mengenai

bentuk perlindungan hukum korban mal praktek, sub bab ketiga berbicara mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya mal praktek

Bab III yang berisikan mengenai bagaimana bentuk pertanggung jawaban hukum mengenai dokter yang menyebabkan terjadinya mal praktek,

Bab IV merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan atas pembahasan pada bab dua dan bab tiga serta berisikan saran-saran atas permasalahan yang didalam penulisan skripsi ini.